



RENCANA KERJA BAKORWIL MADIUN TAHUN 2018



**BADAN KOORDINASI WILAYAH
PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MADIUN**

JL. PAHLAWAN NO.31 MADIUN

DAFTAR ISI

	halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
I.1 Latar Belakang.....	1
I.2 Landasan Hukum	2
I.3 Maksud dan Tujuan	3
I.4 Sistematika Penulisan.....	3
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2016	5
II.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2016.....	5
II.2 Analisis Kinerja Pelayanan	144
II.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah ..	155
II.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	18
II.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	241
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	225
III.1 Telaahan terhadap RPJMD dan RKPD Provinsi Jawa Timur	252
III.2 Tujuan dan Sasaran Renja Tahun 2018.....	252
III.3 Program dan Kegiatan Tahun 2018	263
BAB IV PENUTUP	30

DAFTAR TABEL

	halaman
Tabel II.1 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja s.d. Tahun 2016.....	11
Tabel II.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Bakorwil Madiun.....	15
Tabel II.3 Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD	22
Tabel II.4 Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	21
Tabel III.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019	26

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Dengan ditetapkannya UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), maka setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Paralel dengan pembuatan RKPD, Pasal 7 UU Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap Perangkat Daerah membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif di bidang perencanaan pembangunan daerah, maka perlu adanya tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah. Rencana kerja Perangkat Daerah (PD) atau disebut Renja-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat tentang kebijakan, program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, dan kelompok sasaran yang kemudian menjadi bahan utama masukan dan pertimbangan dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah atau disebut RKPD Provinsi Jawa Timur, serta pagu indikatif dan prakiraan maju yang menggambarkan kebutuhan dana guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan kegiatan.

Renja Bakorwil Madiun merupakan dokumen yang secara substansial merupakan penerjemahan dari visi, misi dan program Bakorwil Madiun yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) sesuai arahan operasional dalam

RKPD. Renja Bakorwil Madiun Tahun 2018, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Bakorwil Madiun tahun 2018.

Dalam rangka meningkatkan peran Bakorwil Madiun dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta dalam mendukung program-program Pemerintah Provinsi Jawa Timur khusus pada Kabupaten/Kota di wilayah kerja Bakorwil Madiun perlu untuk membuat Rencana Kerja yang memuat rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun 2018.

I.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum Bakorwil Madiun dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Jawa Timur;

10. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 134 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur;
11. Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 31 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2017;
12. Keputusan Kepala Bakorwil Madiun Nomor 41 Tahun 2016 tentang Reviu Rencana Strategis Bakorwil Madiun Tahun 2014-2019.

I.3 Maksud dan Tujuan

Renja Bakorwil Madiun Tahun 2018 disusun dengan maksud sebagai berikut:

- a. Renja menjadi acuan dan pertimbangan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Bakorwil Madiun dengan tetap memperhatikan RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2018;
- b. Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan Bakorwil Madiun Tahun 2018.

Sedangkan tujuan penyusunan Renja Bakorwil Madiun Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

- a. Terwujudnya keterpaduan dan sinkronisasi terhadap program-program dalam RKPD dengan mengutamakan pengaruh isu-isu strategis pada tahun 2018;
- b. Renja berisikan program dan kegiatan beserta proyeksi terhadap pagu indikatif dalam rangka pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Bakorwil Madiun tahun 2018 yang mengacu pada Renstra dan RKPD.

I.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Bakorwil Madiun Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2016, memuat tentang narasi dan deskripsi hasil evaluasi pelaksanaan Renja Bakorwil Madiun Tahun

2016, analisis kinerja pelayanan Bakorwil Madiun, serta isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN, memuat tentang Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, dan kebutuhan dana atau pembiayaan dalam Renja Bakorwil Madiun tahun 2018.

BAB IV PENUTUP, memuat uraian berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan dan tindak lanjut Renja Bakorwil Madiun Tahun 2018.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2016

II.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2016 dan Capaian Prioritas Renstra

Renja Tahun 2018 merupakan tahun keempat pelaksanaan Renstra Tahun 2014-2019 yang di dalamnya memuat Sasaran, Indikator Kinerja, dan Target. Pelaksanaan Rencana Kerja Bakorwil Madiun Tahun 2016 sampai dengan keadaan bulan Desember 2016 meliputi 6 (enam) program dan 15 kegiatan dan telah dilaksanakan dengan baik dan lancar. Belanja langsung yang dianggarkan dalam pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2016 adalah sebesar Rp. 3.454.969.771,00,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.385.043.061,00,- atau 97,98%.

Evaluasi pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan: Pelaksanaan Administrasi Perkantoran.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan pagu Rp. 346.000.700,- terealisasi sebesar 98,08% atau Rp. 339.369.932,-.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan:
 1. Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana.
 2. Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana.Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan pagu Rp. 1.349.452.000,- terealisasi sebesar 96,50% atau Rp. 1.302.209.291,-.
3. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah
Kegiatan:
 1. Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah;
 2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

Penyusunan database Perangkat Daerah sebagai Penunjang Pusat Data Provinsi Jawa Timur, dengan pagu Rp. 438.496.000,- terealisasi sebesar 99.53% atau Rp. 436.441.316,-.

4. Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan

Kegiatan:

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan;
2. Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran;
3. Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data.

Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan dengan pagu Rp. 131.655.227,- terealisasi sebesar 98,68% atau Rp. 129.914.987,-.

5. Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan

Kegiatan:

1. Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan

Hasil Pelaksanaan:

- a. Koordinasi dan Pemantauan Kesiapan Posko Siaga Bencana di Kabupaten / Kota Se Bakorwil Madiun Tahun 2016;
- b. Pemantauan dan Inventarisasi Data Pengembangan LSM/Ormas Se Bakorwil Madiun Tahun 2016;
- c. Rapat Sinkronisasi Pemantapan Persiapan Pelaksanaan Lomba Cerdik Cermat Komunikatif (LCKK) Bagi Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Tingkat Bakorwil Madiun 2016;
- d. Rapat Sinkronisasi Kerjasama Antar Daerah (KAD) lingkup Karismapawirogo dan Pawonsari di Bakorwil Madiun Tahun 2016;
- e. Koordinasi dan Pemantauan Inventarisasi Pemutakhiran Data FKUB se Bakorwil Madiun Tahun 2016;
- f. Monitoring UPTD Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur Se-Bakorwil Madiun Tahun 2016;
- g. Koordinasi perkembangan data Anak jalanan dan Gelandangan Pengemis Tahun 2016;

- h. Koordinasi dan Inventarisasi data pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak Kabupaten se-Bakorwil Madiun Tahun 2016;
 - i. Koordinasi dan pemantauan Inventarisasi data Orang Asing se Bakorwil Madiun Tahun 2016;
 - j. Hari Jadi Provinsi Jawa Timur Tahun 2016.
2. Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Bidang Pembangunan Ekonomi
- Kegiatan:
- a. Koordinasi dan Monitoring Pengembangan Investasi Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) Kabupaten/Kota Se-Bakorwil Madiun Tahun 2016 yang dilaksanakan pada tanggal 1 s.d. 15 Februari 2016;
 - b. Rapat Koordinasi dan Fasilitasi Strategi Investasi Daerah Di Pasar Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) Se Wilayah Bakorwil Madiun Tahun 2016 yang dilaksanakan pada tanggal 16 Maret 2016;
 - c. Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan Masyarakat Melalui Kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah (SHAT) Lintas Sektor Se-wilayah Bakorwil Madiun Tahun 2016 yang dilaksanakan tanggal 13 April 2016 sampai dengan 27 April 2016;
 - d. Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pelaksanaan Program Pembangunan Masyarakat Melalui Kegiatan SHAT (Sertifikasi Hak Atas Tanah) Lintas Sektor Se-Wilayah Bakorwil Madiun Tahun 2016 yang dilaksanakan tanggal 24 Mei 2016;
 - e. Koordinasi dan Monitoring Kesiapan Kabupaten/Kota Terkait Ketersediaan Sembilan Bahan Pokok (Sembako) Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1437 H. Tahun 2016, yang dilaksanakan pada tanggal 9 Juni sampai dengan 28 Juni 2016;
 - f. Koordinasi dan Inventarisasi Persiapan Pelaksanaan Festival Makanan Khas Daerah Kabupaten/Kota Se Wilayah Bakorwil Madiun Tahun 2016, yang dilaksanakan tanggal 8 Agustus 2016 sampai dengan 16 Agustus 2016;
 - g. Rapat Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Festival Makanan Khas Daerah Kabupaten/Kota Se-Wilayah Bakorwil Madiun, yang

dilaksanakan di Ruang Pertemuan Tim Penggerak PKK Kabupaten Tulungagung pada hari Selasa, 23 Agustus 2016;

- h. Festival Makanan Khas Daerah Kabupaten/Kota Se-Wilayah Bakorwil Madiun Tahun 2016 di Pendopo "Kongas Arum Kusumaning Bongso" Kabupaten Tulungagung, yang dilaksanakan pada hari Selasa, 4 Oktober 2016.

3. Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Bidang Kemasyarakatan

Kegiatan:

- a. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Raskin Tahun 2015 dan Persiapan Pelaksanaan Program Raskin Tahun 2016 yang dilaksanakan pada tanggal 20 Januari s.d. 03 Februari 2016;
- b. Rapat Evaluasi Pelaksanaan Program Raskin Tahun 2015 dan Sosialisasi Program Raskin Tahun 2016 Se Wilayah Bakorwil Madiun yang dilaksanakan pada tanggal 23 Pebruari 2016;
- c. Rapat Koordinasi Persiapan Lomba Implementasi Budaya Baca Melalui Uji Cerdas Siswa SLTA Tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 yang dilaksanakan pada tanggal 14 April 2016;
- d. Monitoring Penderita Skizofrenia yang dipasung Tahun 2016 di Wilayah Bakorwil Madiun yang dilaksanakan pada tanggal 6 s.d. 25 April 2016;
- e. Rapat Koordinasi Percepatan Penanganan Pembebasan Pasung di Wilayah Bakorwil Madiun Tahun 2016 yang dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 2016;
- f. Koordinasi Dalam Rangka Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Berbasis Keluarga Se Wilayah Bakorwil Madiun yang dilaksanakan pada tanggal 20 Juli s.d 3 Agustus 2016;
- g. Rapat Koordinasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Berbasis Keluarga Se-Wilayah Bakorwil Madiun yang dilaksanakan pada tanggal 9 Agustus 2016;
- h. Koordinasi dan Inventarisasi Kerjasama Bidang kesehatan (Luar Daerah) yang dilaksanakan pada tanggal 26 s.d 28September 2016;

- i. Koordinasi tentang Wabah Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) dan Chikungunya yang dilaksanakan pada tanggal 24 Oktober s/d 3 Nopember 2016;
 - j. Rapat Koordinasi Penanganan Dan Pencegahan Demam Berdarah Dengue (DBD) Dan Chikungunya Sewilayah Bakorwil Madiun Tahun 2016 yang dilaksanakan pada tanggal 22 Nopember 2016.
4. Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Bidang Sarana dan Prasarana
- Kegiatan:
- a. Rapat Penguatan Program Adiwiyata Tahun 2016 yang diselenggarakan pada hari Jum'at tanggal 12 Pebruari 2016 di Bakorwil Madiun;
 - b. Koordinasi dan pemantuan terhadap Pelaksanaan Proyek Jaringan Irigasi yang dibiayai dana APBN/APBD Provinsi Tahun 2016 di wilayah Bakorwil Madiun yang dilaksanakan pada tanggal,18 s/d 26 April 2016 diwilayah Bakorwil Madiun pada UPT PSDA di Madiun, UPT PSDA di Malang dan UPT PSDA di Kediri;
 - c. Koordinasi dan Pemantauan Koordinasi dan Pemantauan Persiapan penyelenggaraan angkutan Lebaran Tahun 2016 pada tanggal 13 Juni s/d 28 Juni 2016 di Kab/Kota Se Bakorwil Madiun;
 - d. Rapat Koordinasi dan Fasilitasi Persiapan Evaluasi dan Pembinaan HIPPA/GHIPPA Tingkat Bakorwil Madiun Tahun 2016;
 - e. Rapat penanggulangan kerusakan lingkungan akibat kerusakan kegiatan pertambangan di Bakorwil Madiun Tahun 2016yang dilaksanakan mulai tanggal 18 Agustus 2016;
 - f. Rapat Koordinasi Optimalisasi Pemanfaatan Aset Milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur Di Wilayah Bakorwil Madiun Tahun 2016 pada tanggal 27 Oktober 2016.

Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan dengan pagu sebesar Rp. 1.003.000.000,- terealisasi 98,86% atau Rp. 991.531.542,-.

6. Program Pengembangan Data Informasi

Kegiatan :

1. Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Data Administrasi Wilayah
 - a. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan SIPD pada Kabupaten/Kota se Bakorwil Madiun Tahun 2015;
 - b. Rapat Koordinasi Dan Evaluasi Pelaksanaan SIPD Pada Kabupaten/Kota se-Bakorwil Madiun Tahun 2016 Dilaksanakan pada Tanggal 10 November 2016 Di Ruang Rapat Lantai Dua Bakorwil Madiun;
2. Penyusunan Database Perangkat Daerah sebagai Penunjang Pusat Data Provinsi Jawa Timur;
 - a. Melakukan update data website resmi Bakorwil Madiun pada portal www.bakorwilmadiun.jatimprov.go.id;
 - b. Meng-update Pusat Data Jawa Timur pada portal: portal.jatimprov.intranet/pusdalip-Bakorwil Madiun;
3. Sinkronisasi, monitoring dan evaluasi Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi
 - a. Koordinasi dan Monitoring Pelaksanaan PPID Kab/Kota se Bakorwil Madiun 2016 pada bulan Mei 2016;
 - b. Rapat Evaluasi Penguatan PPID Kab/Kota se-Bakorwil Madiun dan UPT Prov. Jatim di Kab/Kota Madiun Tahun 2016 hari Kamis tanggal 25 Agustus 2016;

Program Pengembangan Data Informasi dengan pagu Rp. 186.365.844,- terealisasi 99,58% atau Rp. 185.575.993,-.

Berikut ini adalah Tabel Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja s..d Tahun 2016:

Tabel II.1 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja s.d. Tahun 2016

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Tahun 2016	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2015 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2) 2016			Target Program/ Kegiatan Renja Tahun 2017 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d. Tahun Berjalan 2017		
					Target (output)	Realisasi (output)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian Realisasi (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
1											
1	20										
1	20	01									
1	20	01	019	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Persentase pegawai yang puas terhadap pelayanan perkantoran	83%	-	-	-	-	-
					Persentase pegawai yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	93%	-	-	-	-	-
1	20	02									
1	20	02	012	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Persentase pemenuhan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana Perangkat Daerah	83%	-	-	-	-	-

1	20	02	031	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Persentase peralatan dan perlengkapan sarana dan prasarana yang terpelihara	83%	-	-	-	-	-	-	-
1	20	07		Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah									
1	20	07	001	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase kesesuaian kelembagaan pemerintah daerah dengan aturan yang berlaku	100%	-	-	-	-	-	-	-
	20	07	002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Pegawai yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas SDM	60	-	-	-	-	-	-	-
1	20	08		Program Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan									
1	20	08	001	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun	4	-	-	-	-	-	-	-
1	20	08	002	Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran	Jumlah dokumen Pelaporan yang tersusun	22	-	-	-	-	-	-	-
1	20	08	003	Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data	Jumlah Update database Perangkat Daerah	4	-	-	-	-	-	-	-
1	20	96		Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan									
1	20	96	001	Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti	80	-	-	-	-	-	-	-

1	20	96	002	Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Bidang Pembangunan Ekonomi	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pembangunan ekonomi yang ditindaklanjuti	80%	-	-	-	-	-	-	-
1	20	96	003	Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Bidang Kemasyarakatan	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang kemasyarakatan yang ditindaklanjuti	80%	-	-	-	-	-	-	-
1	20	96	004	Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Bidang Sarana Dan Prasarana	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang sarana dan prasarana yang ditindaklanjuti	80%	-	-	-	-	-	-	-
1	20	97		Program Pengembangan Data Informasi									
1	20	97	001	Penyusunan Database Perangkat Daerah sebagai Penunjang Pusat Data Provinsi Jawa Timur	Jumlah sinkronisasi, monitoring dan evaluasi data administrasi wilayah	4	-	-	-	-	-	-	-
1	20	97	002	Penyusunan Database Perangkat Daerah sebagai Penunjang Pusat Data Provinsi Jawa Timur	Jumlah update database Perangkat Daerah	3	-	-	-	-	-	-	-
1	20	97	003	Sinkronisasi, monitoring, dan evaluasi pengelolaan informasi dan dokumentasi	Jumlah sinkronisasi, monitoring dan monitoring pengelolaan informasi dan dokumentasi	3							

II.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Jawa Timur dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 134 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur, maka gambaran pelayanan yang telah dan akan dilaksanakan adalah:

1. Melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengawasan, supervisi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan tugas pembantuan serta optimalisasi pengembangan potensi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerja;
2. Mendorong terwujudnya keterpaduan penyelenggaraan otonomi Pemerintahan Kabupaten/Kota di wilayah;
3. Memfasilitasi penyelesaian permasalahan antar Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah kerja;
4. Memfasilitasi peningkatan program kerjasama dan penyelesaian permasalahan Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Bakorwil Madiun dengan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah khususnya di wilayah perbatasan;
5. Membantu dan memfasilitasi terciptanya hubungan kerjasama yang baik dan harmonis antar Pemerintah Kabupaten/Kota serta antar Instansi Vertikal Departemen/Non Departemen di wilayah;
6. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama yang baik dan harmonis dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten/Kota dan Koordinator Forkopimda di wilayah yang terdiri dari Bakorwil Madiun, Korem 081 Madiun, serta Lanud Iswahyudi Magetan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan di wilayah.

Oleh karena itu, dalam rangka mencapai sasaran strategis Bakorwil Madiun yaitu meningkatnya koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di wilayah kerja Bakorwil Madiun, maka ditetapkan indikator kinerja serta target pencapaiannya sebagaimana tabel berikut:

Tabel II.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Bakorwil Madiun

No.	Indikator	Rencana Capaian Renstra	Target Renstra Tahun 2014-2019					Realisasi Capaian Renstra hingga Tahun 2016	Catatan Analisis
			2015	2016	2017	2018	2019		
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(11)	(14)
1.	Persentase Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Yang Ditindaklanjuti	95%	55%	80%	85%	90%	95%	78%	

II.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Letak geografis kewilayahan Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Madiun berada di sebelah paling barat Provinsi Jawa Timur yang sebagian wilayahnya berbatasan langsung dengan Propinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, sehingga berpotensi terjadinya permasalahan yang berkaitan dengan pemenuhan terhadap pelayanan kebutuhan masyarakat terutama pada daerah-daerah perbatasan, antara lain di bidang pendidikan dan kesehatan.

Sebagian besar topografi daerah di wilayah Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Madiun merupakan pegunungan terjal dan tandus sehingga berpotensi terhadap tingginya angka kemiskinan dan rendahnya tingkat pendidikan serta rendahnya kualitas kesehatan masyarakat.

Di samping itu masih terdapat beberapa kawasan yang merupakan daerah rawan bencana, rawan peredaran narkoba dan rawan perkelahian antar perguruan beladiri dan sebagainya. Berdasarkan kondisi tersebut, maka Bakorwil Madiun meletakkan isu-isu strategis sebagai prioritas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selama kurun waktu (5) lima tahun kedepan.

Isu-isu strategis yang menjadi prioritas Bakorwil Madiun di Tahun 2014-2019 adalah:

1. Isu strategis pada Bidang Pemerintahan yang meliputi:

- a. Rawan terjadinya bencana alam di daerah terutama banjir, longsor, kekeringan, angin puting-beliung;
 - b. Permasalahan batas wilayah antar kabupaten;
 - c. Belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi di daerah;
 - d. Terjadinya perselisihan ormas Perguruan Pencak Silat pada saat tradisi tahunan hari besar keagamaan (Acara Suran Agung, Halal bi Halal antar perguruan silat, dsb);
 - e. Rawan terjadinya permasalahan tentang ketertiban umum, keamanan dan ketentraman masyarakat dan penegakan perda;
 - f. Belum optimalnya penanganan kerjasama antar daerah baik antar kabupaten/kota dalam provinsi maupun luar provinsi.
2. Isu strategis pada Bidang Pembangunan Ekonomi yang meliputi:
- a. Kurangnya penanganan investasi penanaman modal dalam negeri dan modal asing;
 - b. Pengembangan agropolitan yang hanya berbasis pada produk pertanian;
 - c. Masih terjadinya alih fungsi lahan pertanian maupun hutan;
 - d. Belum optimalnya penanganan permodalan koperasi dan UMKM;
 - e. Pengembangan kawasan ekonomi terpadu daerah perbatasan Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah belum optimal;
 - f. Lambat dan kurangnya pemerataan pertumbuhan ekonomi daerah;
 - g. Terjadinya kerusakan hutan dan rendahnya pendapatan masyarakat sekitar hutan;
 - h. Akses pasar produk industri kecil menengah belum optimal;
 - i. Banyaknya kerusakan dan kurang memadainya infrastruktur pertanian (jaringan irigasi dll);
 - j. Lemahnya pengawasan lalu lintas peredaran produk pangan dan non pangan.
3. Isu strategis pada Bidang Kemasyarakatan yang meliputi:
- a. Lambatnya laju penurunan angka kemiskinan dan jumlah masyarakat miskin;
 - b. Terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan kesehatan terutama angka kematian ibu dan anak, penanganan gizi buruk dan pencegahan dari penularan serta pengobatan kasus HIV/AIDS;

- c. Belum adanya keadilan dan kesetaraan gender, perlindungan dan kesejahteraan perempuan;
 - d. Masih tingginya angka pengangguran terbuka yang belum seimbang dengan jumlah lapangan pekerjaan;
 - e. Belum optimalnya penanganan PMKS terutama Anjal (Anak Jalanan), gelandangan, WTS, pengemis dan gelandangan psikotik;
 - f. Belum optimalnya penanganan kualitas pendidikan terutama masih adanya siswa putus sekolah (Wajib Belajar 12 Tahun) dan masih adanya penduduk buta aksara serta perlunya penyetaraan Pendidikan Madrasah Diniyah;
 - g. Belum optimalnya program pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba (P4GN);
 - h. Belum efektifnya program Rastra terutama tepat sasaran (RTSM), tepat kuantitas, tepat administrasi dan tepat pembayaran.
4. Isu strategis pada Bidang Sarana dan Prasarana yang meliputi :
- a. Belum optimalnya perbaikan dan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan;
 - b. Kurang optimalnya pengembangan pemanfaatan energi panas bumi;
 - c. Kurangnya perbaikan dan pemeliharaan jaringan irigasi, waduk, DAM dan bendungan;
 - d. Belum optimalnya penanganan dan pengelolaan lingkungan hidup terutama pencemaran air dan pengolahan limbah;
 - e. Belum seimbang Penyediaan Ruang Terbuka Hijau;
 - f. Ketidakserasian RTRW provinsi dan kabupaten baik dari segi perencanaan dan aplikasinya;
 - g. Belum optimalnya penanganan lahan kritis.
5. Kurangnya penyediaan data dan informasi pendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang meliputi :
- a. Belum optimalnya peran Badan Publik dan PPID dalam memberikan layanan informasi publik;
 - b. Terbatasnya ketersediaan data dan informasi yang disajikan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
 - c. Peningkatan kualitas SDM penyedia data dan informasi terutama dalam mendorong terwujudnya data sebagai sumber informasi masing-masing daerah;

d. Peningkatan SDM aparatur dalam penerapan tata naskah elektronik.

II.4 Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD dilakukan untuk mengetahui apakah diperlukan adanya perubahan terhadap program/kegiatan, indikator, serta anggaran dalam rencana kerja yang akan disusun. Setelah melalui analisis kebutuhan, diperoleh bahwa hasil analisis kebutuhan menunjukkan tidak ada perubahan yang diperlukan terhadap program/kegiatan, indikator, serta anggaran dalam rancangan Renja Bakorwil Madiun Tahun 2018. Hasilnya disajikan dalam bentuk tabel berikut :

Tabel II.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Bakorwil Madiun

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan				
No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Madiun	Indeks kepuasan aparatur terhadap pelayanan adm perkantoran dan kenyamanan kantor	89%	348.290.000					
	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Madiun	Persentase pegawai yang puas terhadap pelayanan perkantoran	86%	348.290.000					
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Madiun	Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi	89%	1.665.850.000					
	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Madiun	Persentase pemenuhan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana Perangkat Daerah	89%	797.000.000					

	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Madiun	Persentase peralatan dan perlengkapan sarana dan prasarana yang terpelihara	89%	868.850.000					
3.	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Madiun	Persentase Kelembagaan yang tepat fungsi	100%	443.860.000					
	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Madiun	Persentase kesesuaian kelembagaan pemerintah daerah dengan aturan yang berlaku	100%	261.510.000					
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Madiun	Jumlah pegawai yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas SDM	60	182.350.000					
4.	Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan	Madiun	Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu	89%	117.140.000					
	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Madiun	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun	4	42.955.000					
	Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran	Madiun	Jumlah dokumen Pelaporan yang tersusun	22	47.500.000					
	Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data	Madiun	Jumlah Update database Perangkat Daerah	4	26.685.000					
5.	Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Bidang Pemerintahan	Madiun	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti	90%	551.250.000					

	Kegiatan Koordinasi, Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Perpustakaan, Kearsipan, Statistik, Persandian dan Tugas Pembantuan	Madiun	Jumlah laporan kegiatan Sub Bidang Pemerintahan I	90%	275.625.000					
	Kegiatan Koordinasi, Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Trantib dan Linmas, Kominfo, Administrasi Penduk Capil dan Tugas Pembantuan	Madiun	Jumlah laporan kegiatan Sub Bidang Pemerintahan II	90%	275.625.000					
6.	Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Bidang Pembangunan Ekonomi	Madiun	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pembangunan ekonomi yang ditindaklanjuti	90%	372.000.000					
	Kegiatan Koordinasi, Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Koperasi, UKM, Penanaman Modal, Perdagangan, Perindustrian dan Tugas Pembantuan	Madiun	Jumlah laporan kegiatan Sub Bidang Pembangunan Ekonomi I	90%	186.375.000					
	Kegiatan Koordinasi, Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Pangan, Pertanian, Kelautan, Perikanan dan Tugas Pembantuan	Madiun	Jumlah laporan kegiatan Sub Bidang Pembangunan Ekonomi II	90%	186.375.000					
7.	Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan dan	Madiun	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang kemasyarakatan yang ditindaklanjuti	90%	372.000.000					

	Pembangunan Bidang Kemasyarakatan									
	Kegiatan Koordinasi, Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Pendidikan, Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Tugas Pembantuan	Madiun	Jumlah laporan kegiatan Sub Bidang Kemasyarakatan I	5	186.375.000					
	Kegiatan Koordinasi, Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB, Kepemudaan dan Olahraga, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kebudayaan, Pariwisata dan Tugas Pembantuan	Madiun	Jumlah laporan kegiatan Sub Bidang Kemasyarakatan II	5	186.375.000					
8.	Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Bidang Sarana Prasarana	Madiun	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang sarana dan prasarana yang ditindaklanjuti	90%	372.000.000					
	Kegiatan Koordinasi, Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan, Perhubungan dan Tugas Pembantuan	Madiun	Jumlah laporan kegiatan Sub Bidang Sarana dan Prasarana I	5	186.375.000					
	Kegiatan Koordinasi, Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang	Madiun	Jumlah laporan kegiatan Sub Bidang Sarana dan Prasarana II	5	186.375.000					

	Lingkungan Hidup, Kehutanan, ESDM dan Tugas Pembantuan									
9.	Program Pengembangan Data Informasi	Madiun	Prosentase (%) jumlah keterisian data dan informasi	61%	231.050.000					
	Sinkronisasi, monitoring dan evaluasi data administrasi wilayah	Madiun	Jumlah sinkronisasi, monitoring dan evaluasi data administrasi wilayah	4	136.500.000					
	Penyusunan Database Perangkat Daerah sebagai Penunjang Pusat Data Provinsi Jawa Timur	Madiun	Jumlah update database Perangkat Daerah	3	28.400.000					
	Sinkronisasi, monitoring, dan evaluasi pengelolaan informasi dan dokumentasi	Madiun	Jumlah sinkronisasi, monitoring dan monitoring pengelolaan informasi dan dokumentasi	3	66.150.000					

II.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bakorwil Madiun pada tahun 2016 belum melaksanakan penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat yang secara langsung menjadi Program dan Kegiatan yang ada di Bakorwil Madiun.

Tabel II.4 Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
-	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

III.1 Telaahan terhadap RPJMD dan RKPD Provinsi Jawa Timur

Rencana Kerja Bakorwil Madiun Tahun 2018 disesuaikan dengan Reviu Renstra Bakorwil Madiun Tahun 2014-2019 yang merupakan pelaksanaan atas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018 yang juga merupakan pelaksanaan atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019. Pada periode masa jabatan Pemerintah Pemerintah Provinsi Jawa Timur menetapkan visinya sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 - 2019 yaitu Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, Berdaya Saing dan Berakhlak dengan Misi Makin Mandiri dan Sejahtera bersama 'Wong Cilik'. Oleh karena itu, Bakorwil Madiun selaku Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang ada di daerah dengan tupoksi melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembangunan di Jawa Timur, maka seluruh sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatannya harus dibuat untuk turut mendorong terwujudnya visi dan misi tersebut. Untuk mendorong visi dan misi Gubernur Jawa Timur maka sasaran yang menjadi target Bakorwil Madiun adalah meningkatnya koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di wilayah kerjanya, dengan fokus Misi ke-4 yaitu meningkatkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik.

Dengan demikian seluruh potensi sumber daya lingkungan strategis internal Bakorwil Madiun, baik yang berkaitan dengan kekuatan yang dimiliki, didayagunakan secara optimal untuk mendukung percepatan terwujudnya visi, misi, tujuan, sasaran dan strategis sebagaimana telah dituangkan pada RPJMD Pemerintah Provinsi Jawa Timur sesuai dengan tupoksi Bakorwil Madiun.

III.2 Tujuan dan Sasaran Renja Tahun 2018

Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Adapun tujuan yang hendak dicapai Bakorwil Madiun adalah :

“Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di wilayah kerja Bakorwil Madiun”

Dengan demikian, sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan oleh Bakorwil Madiun dapat dirumuskan berdasarkan tujuan pembangunan yang telah ditetapkan, maka sasaran pembangunan Bakorwil Madiun adalah:

“Meningkatnya Koordinasi, Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Wilayah Kerja
Bakorwil Madiun”

III.3 Program dan Kegiatan Tahun 2018

Program dan kegiatan dalam Renja Bakorwil Madiun Tahun 2018 mendatang didasari pada harmonisasi Program RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 serta RKPD Tahun 2018 antara lain, sebagai berikut:

1. Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Bidang Pemerintahan

Kegiatan dan sub-kegiatan pada program ini adalah:

Sinkronisasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan Bidang Pemerintahan, dengan sub-kegiatan:

- Sinkronisasi dan Monitoring Persiapan dan Kesiapan Pekan KIM (Kelompok Informasi Masyarakat) se-Jawa Timur;
- Sinkronisasi dan Pemantauan Antisipasi Potensi Gangguan Keamanan dan Ketertiban Umum;
- Sinkronisasi dan Pemantauan Kebencanaan di Wilayah Bakorwil Madiun;
- Sinkronisasi dan Pemantauan Pelaksanaan Kerjasama antar Daerah;
- Hari Jadi Provinsi Jawa Timur.

2. Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Bidang Pembangunan Ekonomi

Kegiatan dan sub-kegiatan pada program ini adalah:

Sinkronisasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan Bidang Pembangunan Ekonomi, dengan sub-kegiatan:

- Peningkatan aktivitas ekonomi (Pengembangan Penanaman Modal/Investasi);
- Pengembangan Koperasi dan UMKM (Penguatan daya saing UMKM);
- Peningkatan Aktivitas Ekonomi (Jalur distribusi Perdagangan);
- Pengembangan diversifikasi Pangan dan Pertanian (Persiapan Festival Makanan Khas Daerah);
- Festival Makanan Khas Daerah.

3. Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Bidang Kemasyarakatan
Sinkronisasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan Bidang Kemasyarakatan, dengan sub-kegiatan;
 - Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan PMKS, P4GN;
 - Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Feminisasi Kemiskinan, Gender, Kesehatan, BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan serta Raskin;
 - Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Seni, Budaya dan Pariwisata;
 - Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Perpustakaan (Lomba Uji Cerdas).
4. Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Bidang Sarana dan Prasarana
Sinkronisasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan Bidang Sarana dan Prasarana, dengan sub kegiatan.
 - Sinkronisasi dan monitoring Pengelolaan aset Provinsi Jawa Timur;
 - Monitoring Musrenbang Kabupaten/Kota se-Bakorwil Madiun;
 - Monitoring Kesiapan Angkutan Lebaran;
 - Monitoring Penyelenggaraan jaringan Irigasi Proyek APBN dan APBD Provinsi Jawa Timur;
 - Monitoring Penyelenggaraan Infrastruktur Jalan Provinsi.
 - Monitoring Persiapan Evaluasi HIPPA & GHIPPA;
 - Monitoring Kelestarian Lingkungan Hidup/Desa Berseri;
 - Monitoring Penanggulangan Kerusakan Lingkungan dampak pemanfaatan sumber daya alam.
5. Program Pengembangan Data Informasi
Kegiatan pada program ini adalah:
 - a. Sinkronisasi, monitoring dan evaluasi data administrasi wilayah
Sub-kegiatan:
 - Sinkronisasi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan SIPD;
 - Penyusunan Buku Profil Data Administrasi Wilayah.
 - b. Penyusunan database Perangkat Daerah sebagai penunjang Pusat Data Provinsi Jawa Timur;
Sub-kegiatan:

- Pelaksanaan pembaharuan data (update) dalam menunjang Pusat Data Provinsi Jawa Timur;
- c. Sinkronisasi, monitoring, dan evaluasi pengelolaan Informasi dan Dokumentasi.

Sub-kegiatan:

- Fasilitasi Pelaksanaan PPID Kabupaten/Kota se-Bakorwil Madiun;
- Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan PPID.

Tabel III.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2018
dan Prakiraan Maju Tahun 2019

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)			
1												
	URUSAN WAJIB											
1	20			Bidang Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian								
1	20	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks kepuasan masyarakat/aparatur terhadap pelayanan adm perkantoran dan kenyamanan kantor	Madiun	89%	348.290.000	APBD PROV		92%	365.710.000
1	20	01	019	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Persentase pegawai yang puas terhadap pelayanan perkantoran	Madiun	89%	348.290.000	APBD PROV		92%	365.710.000
1	20	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi	Madiun	89%	1.665.850.000	APBD PROV		92%	1.749.140.000
1	20	02	012	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Persentase pemenuhan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana	Madiun	89%	797.000.000	APBD PROV		92%	836.850.000
1	20	02	031	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Persentase peralatan dan perlengkapan sarana dan prasarana yang terpelihara	Madiun	89%	868.850.000	APBD PROV		92%	912.290.000
1	20	07		Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase Kelembagaan yang tepat fungsi	Madiun	100%	443.860.000	APBD PROV		100%	466.053.000
1	20	07	001	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase kesesuaian kelembagaan pemerintah Daerah	Madiun	100 %	261.510.000	APBD PROV		100 %	274.585.500

					daerah dengan aturan yang berlaku							
1	20	07	002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan/pelatihan formal	Madiun	60	182.350.000	APBD PROV		60	191.467.500
1	20	08		Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu	Madiun	89%	117.140.000	APBD PROV		92%	123.000.000
1	20	08	001	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun	Madiun	4	42.955.000	APBD PROV		4	45.100.000
1	20	08	002	Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran	Jumlah dokumen Pelaporan yang tersusun	Madiun	22	47.500.000	APBD PROV		22	49.880.000
1	20	08	003	Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data	Jumlah Update database Perangkat Daerah	Madiun	4	26.685.000	APBD PROV		4	28.020.000
3	14	21		Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Bidang Pemerintahan	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti	Madiun	90%	551.250.000	APBD PROV		95%	578.820.000
3	14	21	003	Kegiatan Koordinasi, Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Perpustakaan, Kearsipan, Statistik, Persandian dan Tugas Pembantuan	Jumlah laporan kegiatan Sub Bidang Pemerintahan I	Madiun	5	275.625.000	APBD PROV		5	289.410.000
3	14	21	004	Kegiatan Koordinasi, Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Trantib dan Linmas, Kominfo, Administrasi Penduk Capil dan Tugas Pembantuan	Jumlah laporan kegiatan Sub Bidang Pemerintahan II	Madiun	5	275.625.000	APBD PROV		5	289.410.000
3	14	22		Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Penyelenggaraan	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang	Madiun	90%	372.000.000	APBD PROV		95%	391.390.000

				Pemerintahan dan Pembangunan Bidang Pembangunan Ekonomi	pembangunan ekonomi yang ditindaklanjuti							
3	14	22	008	Kegiatan Koordinasi, Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Koperasi, UKM, Penanaman Modal, Perdagangan, Perindustrian dan Tugas Pembantuan	Jumlah laporan kegiatan Sub Bidang Pembangunan Ekonomi I	Madiun	5	186.375.000	APBD PROV		5	195.695.000
3	14	22	009	Kegiatan Koordinasi, Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Pangan, Pertanian, Kelautan, Perikanan dan Tugas Pembantuan	Jumlah laporan kegiatan Sub Bidang Pembangunan Ekonomi II	Madiun	5	186.375.000	APBD PROV		5	195.695.000
3	14	23		Program Koordinasi, Fasilitas dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Bidang Kemasyarakatan	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang kemasyarakatan yang ditindaklanjuti	Madiun	90%	372.000.000	APBD PROV		95%	391.390.000
3	14	23	008	Kegiatan Koordinasi, Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Pendidikan, Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Tugas Pembantuan	Jumlah laporan kegiatan Sub Bidang Kemasyarakatan I	Madiun	5	186.375.000	APBD PROV		5	195.695.000
3	14	23	009	Kegiatan Koordinasi, Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB, Kepemudaan dan Olahraga, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kebudayaan, Pariwisata dan Tugas Pembantuan	Jumlah laporan kegiatan Sub Bidang Kemasyarakatan II	Madiun	5	186.375.000	APBD PROV		5	195.695.000
3	14	24		Program Koordinasi, Fasilitas dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan dan	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang sarana dan prasarana yang ditindaklanjuti	Madiun	90%	372.000.000	APBD PROV		95%	391.390.000

				Pembangunan Bidang Sarana Prasarana								
3	14	24	007	Kegiatan Koordinasi, Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan, Perhubungan dan Tugas Pembantuan	Jumlah laporan kegiatan Sub Bidang Sarana dan Prasarana I	Madiun	5	186.375.000	APBD PROV		5	195.695.000
3	14	24	008	Kegiatan Koordinasi, Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup, Kehutanan, ESDM dan Tugas Pembantuan	Jumlah laporan kegiatan Sub Bidang Sarana dan Prasarana II	Madiun	5	186.375.000	APBD PROV		5	195.695.000
3	14	97		Program Pengembangan Data Informasi	Persentase keterisian data dan informasi pembangunan daerah kabupaten/kota	Madiun	90%	403.220.000	APBD PROV		95%	243.653.000
3	14	97	001	Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Data Administrasi Wilayah	Jumlah koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi data administrasi wilayah	Madiun	4	208.690.000	APBD PROV		4	143.325.000
3	14	97	002	Penyusunan Database Perangkat Daerah sebagai Penunjang Pusat Data Provinsi Jawa Timur	Jumlah update database penunjang Pusat Data Provinsi Jawa Timur	Madiun	3	55.170.000	APBD PROV		3	30.870.000
3	14	97	009	Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi	Jumlah koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi PPID	Madiun	3	139.360.000	APBD PROV		3	69.458.000

BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja Bakorwil Madiun Tahun 2018 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Reviu Renstra Bakorwil Madiun Tahun 2014-2019 dalam menunjang tercapainya visi dan misi Pemerintah Provinsi Jawa Timur serta target dan sasaran pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018.

Dukungan anggaran yang memadai sangat menunjang pelaksanaan semua program dan kegiatan yang direncanakan sehingga mampu mencapai target yang telah ditetapkan.

Untuk tindak lanjut dalam penyusunan Renja ini selanjutnya kami akan menyusun program kegiatan dan anggaran dalam bentuk Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Tahun 2018.

Demikian Renja Tahun 2018 ini dibuat dan diharapkan akan menjadi pedoman semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program dan kegiatan Bakorwil Madiun, sehingga seluruh program dan kegiatan akan dapat dicapai secara terukur, terarah, efektif dan efisien.

Madiun, 2017
KEPALA BAKORWIL MADIUN

DR. SUPRIANTO, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 19590501 198003 1 010